



Article Informations  
Corresponding Email:  
safitriputri009@gmail.com

Received: 24/07/2025; Accepted:  
25/08/2025; Published: 15/10/2025

## **FAKTOR PENDORONG AMERIKA SERIKAT MENGELUARKAN KEBIJAKAN COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT (CAATSA) TERHADAP IRAN**

**Putri Safitri<sup>1</sup>, Renaldo Benarrivo<sup>2</sup>, Bimbi Rianda<sup>3</sup>.**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Sebagai negara *superpower*, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering kali membawa dampak luas secara global. Di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat menunjukkan kepentingan strategisnya, khususnya terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh, seperti Iran. Dalam menghadapi tantangan tersebut, AS kerap menggunakan sanksi sebagai instrumen utama kebijakan luar negerinya, salah satunya melalui kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan CAATSA terhadap Iran. Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme neoklasik, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep sanksi internasional, dengan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan CAATSA terhadap Iran dipengaruhi oleh kombinasi tekanan internasional dan pertimbangan domestik. Di tingkat internasional, kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap kekhawatiran atas peran Iran yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan, terutama terkait program nuklir dan aktivitas militernya. Secara domestik, putusan tersebut juga dipengaruhi oleh tekanan politik domestik, seperti kepentingan ekonomi, dorongan dari Kongres, kelompok lobi tertentu, dan strategi pemerintah dalam memperkuat citra sebagai negara yang tegas terhadap negara yang dianggap sebagai musuh.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat, CAATSA, Iran, Kebijakan Luar Negeri

### **Abstract**

*As a superpower, the United States' foreign policy often has a broad global impact. In the Middle East region, the United States shows its strategic interests, especially towards countries that are considered as enemies, such as Iran. In facing these challenges, the US often uses sanctions as the main instrument of its foreign policy, one of which is through the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) policy. This research aims to analyze the driving factors of the United States issuing the CAATSA policy against Iran. This research uses the neoclassical realism approach, the concept of foreign policy, and the concept of international sanctions, with an explanatory qualitative research method. The results showed that the CAATSA policy towards Iran was influenced by a combination of international pressure and*

*domestic considerations. At the international level, this policy is a form of response to concerns over Iran's role that is considered to disrupt regional stability, especially regarding its nuclear program and military activities. Domestically, the decision was also influenced by domestic political pressures, such as economic interests, encouragement from Congress, certain lobby groups, and the government's strategy in strengthening its image as a country that is assertive towards countries considered as enemies.*

**Keywords:** *United States, CAATSA, Iran, Foreign Policy*

## **1. PENDAHULUAN**

Berakhirnya Perang Dingin secara luas dipandang sebagai titik awal dari babak baru dalam sejarah hubungan internasional yang masih terasa dampaknya hingga kini. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu momen paling krusial dalam politik global sejak berakhirnya Perang Dunia II. Perubahan besar yang terjadi tidak hanya memengaruhi posisi dan kedaulatan negara-negara, tetapi juga menggeser arah kebijakan, agenda, dan prioritas banyak negara di seluruh dunia. Ini menjadi penanda transisi besar dalam tatanan internasional (Yuanita et al., 2024). Salah satu titik balik penting dalam perubahan ini terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin, yang menjadi awal mula bergesernya fokus keamanan dari yang semula hanya menitikberatkan pada aspek militer, menjadi lebih luas mencakup juga aspek non-militer seperti ekonomi, sosial-budaya, dan isu lingkungan. Setiap negara tentu memiliki agendanya tersendiri dalam menyusun kebijakan demi melindungi dan mewujudkan kepentingan nasional (Azizah, 2020).

Sebagai negara *superpower*, kebijakan Amerika Serikat (AS), baik domestik maupun luar negerinya yang berlandaskan pada kepentingan nasional, sering kali membawa dampak besar bagi dunia. Dengan pengaruh global yang luas, AS memiliki kapasitas untuk mengarahkan dinamika politik internasional, bahkan mendorong negara-negara yang sedang berkonflik untuk duduk di meja perundingan. Kawasan Timur Tengah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negerinya, terutama karena potensi besar sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari upaya berkelanjutan AS menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Selain itu, komitmen AS terhadap keamanan kawasan tercermin dari kehadiran banyak pangkalan militernya yang

tersebar di berbagai titik strategis di Timur Tengah (Putri et al., 2023). Namun, salah satu hubungan paling krusial dan kompleks yang dijalani oleh AS adalah dengan Iran.

Hubungan antara AS dan Iran telah menjadi salah satu fokus utama dalam studi hubungan internasional selama lebih dari empat dekade. Ketegangan antara kedua negara tidak hanya berdampak pada dinamika bilateral, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap keamanan regional di Timur Tengah dan stabilitas global. Isu ini mencerminkan bagaimana interaksi antarnegara melibatkan berbagai kepentingan strategis, ideologi, serta penggunaan instrumen kekuasaan seperti diplomasi, sanksi ekonomi, dan bahkan ancaman militer (Alkholid, 2021). Dalam hubungan internasional, konflik AS-Iran menggambarkan dinamika antara negara besar dan negara berkembang yang berupaya mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan hegemoni global.

Permusuhan yang membayangi hubungan antara AS dan Iran tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari rangkaian peristiwa sejarah yang kompleks dan panjang sejak awal abad ke-20. Saat itu, Iran mulai menarik perhatian negara-negara Barat, termasuk AS, berkat kekayaan sumber daya alamnya yang menjanjikan, khususnya cadangan minyak yang melimpah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dunia Barat untuk mendukung proses industrialisasi dan kepentingan militer mereka, minyak Iran pun menjadi aset strategis yang sangat bernilai (Purba et al., 2024). Dalam hal tersebut, minyak Iran tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai aset strategis yang sangat bernilai, sehingga mendorong keterlibatan dan intervensi asing yang kemudian mempengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara hingga saat ini.

Ketegangan mulai meningkat pada tahun 1951 ketika Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mengambil langkah berani dengan menasionalisasi industri minyak Iran, yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Tindakan ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan ekonomi AS. Sebagai respons, dinas intelijen CIA dan MI6 meluncurkan Operasi Ajax pada tahun 1953, sebuah operasi rahasia yang berhasil menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan

kepada Shah Mohammad Reza Pahlavi. Kudeta ini tidak hanya menandai kembalinya dominasi Barat di Iran, tetapi juga menjadi titik awal ketidakpercayaan mendalam rakyat Iran terhadap campur tangan asing dalam urusan dalam negeri mereka. Seiring waktu, peristiwa ini menyulut rasa kecewa, marah, dan anti-Barat yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Iran, yang kemudian menjadi fondasi dari konflik jangka panjang antara Iran dan AS (Purba et al., 2024).

Selama masa pemerintahan Shah, Iran mengalami proses modernisasi yang pesat dan menjalin hubungan erat dengan AS. Namun, di balik kemajuan ekonomi dan modernisasi, kebijakan-kebijakan otoriter, merajalelanya korupsi, serta ketimpangan sosial yang semakin parah menimbulkan ketidakpuasan luas di tengah masyarakat. Puncaknya terjadi pada tahun 1979 melalui Revolusi Iran yang menggulingkan kekuasaan Shah dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Revolusi ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Iran, yang tidak hanya menandai berakhirnya pengaruh Barat, tetapi juga membuka era baru konfrontasi langsung dengan AS (Purba et al., 2024). Setelah terjadinya Revolusi Iran, hubungan antara kedua negara mengalami kemunduran yang signifikan. AS memandang revolusi tersebut sebagai faktor yang mengubah tatanan kekuatan di kawasan Timur Tengah, karena pemerintahan Iran yang baru dipimpin oleh elit politik yang menolak ketergantungan pada AS (Mohamad Fuat Najib, 2022).

Ketegangan memuncak kembali ketika AS di bawah Presiden Donald Trump pada tahun 2018 menarik diri secara sepihak dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), yang sebelumnya ditandatangani oleh Iran dan enam negara lainnya pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut sejatinya bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi internasional. Namun, pemerintahan Trump menilai bahwa JCPOA terlalu lemah dan tidak menyentuh aspek lain dari perilaku Iran yang dianggap destabilizing. Keputusan ini diambil meskipun *International Atomic Energy Agency* (IAEA) telah menyatakan bahwa Iran telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam JCPOA (Angelia, 2021). Tindakan sepihak Presiden Trump menarik perhatian

dunia internasional, karena JCPOA dipandang sebagai sebuah perjanjian yang berpotensi memperbaiki hubungan antara Iran dan negara-negara Barat (Hasibuan, 2020).

AS kemudian memperkenalkan kebijakan luar negeri baru melalui pengesahan Undang-Undang sanksi yang dikenal sebagai *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA). UU ini disahkan oleh Kongres AS pada 2 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Presiden Trump. Undang-undang federal ini menetapkan pemberlakuan sanksi terhadap Rusia, Iran, dan Korea Utara, termasuk terhadap negara-negara sekutu AS yang menjalin kerja sama dengan ketiga negara tersebut, khususnya negara-negara anggota NATO (Yusra & Dermawan, 2020). Sebagai negara dengan status adidaya, AS memiliki kekuatan dan pengaruh ekonomi yang sangat dominan. Keunggulan ini memberinya ruang untuk menyebarkan praktik kapitalisme secara global. Dengan kekuasaan tersebut, AS mampu mengarahkan kebijakan luar negerinya guna memenuhi kepentingan nasionalnya, termasuk di kawasan Timur Tengah (Wambrauw & Apintamon, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik suatu fenomena dan menjawab pertanyaan “mengapa” dengan menelusuri hubungan sebab-akibat serta memahami konteks sosial yang melatarbelakangi sebuah peristiwa (Sarwono, 2006). Metode ini dianggap relevan untuk menganalisis alasan di balik kebijakan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan CAATSA terhadap Iran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data sekunder dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber daring terpercaya, guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait topik penelitian (Muhammad, 2021).

## **2. PEMBAHASAN**

Pendekatan *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen menekankan pentingnya memahami proses di balik pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, bukan hanya

hasil akhirnya. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama: lingkungan pengambilan keputusan, psikologis, internasional, dan domestik (Alex Mintz, 2010). Namun, untuk menganalisis penelitian ini berfokus pada dua faktor yang paling relevan, yaitu faktor domestik dan internasional.

### **A. Faktor Internasional**

Dalam dinamika politik global yang terus berkembang, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh tekanan lingkungan internasional. Pembentukan kebijakan CAATSA oleh Amerika Serikat terhadap Iran merupakan respons terhadap kondisi geopolitik yang kompleks. Posisi strategis Iran dan situasi regional menjadi latar belakang penting dalam pembentukan kebijakan ini, yang dipengaruhi oleh empat indikator utama: pencegahan, perlombaan senjata, pembentukan aliansi, dan tipe rezim musuh.

#### **Pencegahan**

Pencegahan merupakan langkah yang diambil oleh suatu negara dalam tatanan internasional yang bersifat anarkis, dengan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi keamanan nasionalnya. Kebijakan CAATSA dirancang sebagai instrumen sanksi strategis untuk membatasi aktivitas militer, ekonomi, dan politik Iran yang dianggap mengancam stabilitas kawasan dan kepentingan AS. Berdasarkan Pasal 103(a), kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menyusun strategi jangka panjang guna menghadapi ancaman konvensional maupun asimetris dari Iran (Congress, 2017). Selain sebagai respons terhadap tindakan masa lalu seperti program nuklir dan dukungan terhadap milisi, kebijakan CAATSA juga bertujuan mencegah potensi ancaman di masa depan melalui pendekatan diplomasi koersif.

Kebijakan CAATSA mengadopsi sanksi sekunder, menasar pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan Iran, sehingga mempersempit akses Iran terhadap sumber daya dan sistem keuangan global (Georgi, 2017). Lebih dari sekadar instrumen hukuman, kebijakan CAATSA dirancang sebagai alat pencegah strategis yang bertujuan mengisolasi Iran secara ekonomi dan politik agar menghentikan perilaku yang dianggap mengancam stabilitas global. Langkah ini menunjukkan bagaimana AS

membangun strategi pencegahan yang tidak lagi bergantung pada kekuatan militer semata, melainkan memanfaatkan dominasinya dalam sistem keuangan dan perdagangan global. Melalui pendekatan ini, pencegahan bukan hanya dimaknai sebagai upaya menghentikan tindakan langsung Iran, tetapi juga sebagai cara menciptakan situasi di mana pilihan-pilihan strategis Iran menjadi semakin terbatas dan mahal secara ekonomi maupun politis.

### **Perlombaan Senjata**

Perlombaan senjata adalah suatu keadaan di mana negara merasa terancam oleh kepemilikan atau pengembangan senjata oleh negara lain, sehingga mendorongnya untuk memperkuat kapasitas persenjataan sendiri demi menciptakan rasa aman dan menjaga keseimbangan kekuatan. Kemajuan pesat industri militer Iran, khususnya dalam pengembangan rudal dan teknologi nuklir yang minim transparansi, telah memicu kekhawatiran internasional dan berpotensi mendorong perlombaan senjata di Timur Tengah. Iran kini dikenal sebagai kekuatan regional dalam produksi rudal balistik dan drone murah, dengan dukungan ribuan perusahaan teknologi dan ratusan fasilitas produksi di dalam maupun luar negeri (El-Komy, 2025). Program rudal jarak jauh Iran yang mampu menjangkau hingga 2.000 km, ditambah ambisi nuklirnya, menimbulkan ancaman langsung bagi sekutu AS di kawasan seperti Israel dan pangkalan militer AS. Dugaan aktivitas nuklir tersembunyi di fasilitas seperti Varamin dan METFAZ memperkuat kekhawatiran terhadap potensi pengembangan senjata nuklir.

Dengan latar belakang tersebut, penerapan kebijakan CAATSA terhadap Iran dapat dipahami sebagai respons strategis AS untuk menghambat laju pertumbuhan kekuatan militer Iran. Kebijakan CAATSA bukan hanya dimaksudkan untuk memberi tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menahan efek domino dari perlombaan senjata, khususnya dalam proliferasi rudal dan teknologi militer yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan instabilitas kawasan. Dengan memperketat akses Iran terhadap teknologi militer dan pendanaan asing, AS berupaya menjaga dominasi militernya dan mencegah terbentuknya

kekuatan tandingan yang dapat menantang hegemoni keamanan regional yang selama ini dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

### **Pembentukan Aliansi**

Pembentukan aliansi adalah kesepakatan antarnegara untuk saling membantu jika salah satu mengalami serangan bersenjata. Kebijakan CAATSA memberikan dasar hukum bagi AS untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap entitas yang mendukung aktivitas ekonomi, militer, atau teknologi Iran (Stewart, 2022). Melalui sanksi sekunder, kebijakan ini memaksa negara dan perusahaan global memilih antara bermitra dengan Iran atau menjaga akses ke pasar internasional berbasis dolar AS. Kebijakan ini menjadi alat isolasi strategis sekaligus memperkuat posisi geopolitik AS melalui efek jera dan polarisasi aliansi internasional.

Pemerintahan Trump memperkuat hubungan dengan kelompok pro-sanksi seperti AIPAC. Kelompok ini berperan besar dalam mendorong kebijakan keras terhadap Iran melalui pengaruh legislatif dan lobi yang terorganisir. Tekanan dari sekutu regional seperti Israel dan Arab Saudi juga berperan signifikan. Israel memandang Iran sebagai ancaman utama, sementara Arab Saudi mendorong pembentukan koalisi anti-Iran melalui forum-forum internasional. Dukungan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut memperkuat legitimasi kebijakan ini sebagai bagian dari strategi bersama untuk membendung kekuatan Iran, sekaligus memperkokoh kepemimpinan AS dalam sistem aliansi global.

### **Tipe Rezim Musuh**

Tipe rezim musuh adalah klasifikasi atau kategori pemerintahan yang dianggap sebagai ancaman atau lawan. Pasca Perang Dingin, AS mengadopsi kebijakan luar negeri berbasis hegemoni liberal untuk menyebarkan demokrasi dan menjaga stabilitas global. Pandangan ini diperkuat oleh keyakinan bahwa intervensi terhadap rezim otoriter sah demi menegakkan HAM dan stabilitas, sesuai dengan prinsip *democratic peace* yang menyatakan bahwa negara demokrasi cenderung tidak saling berperang (Malik, 2022).

Iran, dengan sistem teokratis yang mengontrol politik hingga kehidupan pribadi, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi

liberal yang dijunjung AS. Rezim Iran memadukan agama, ideologi, dan nasionalisme dalam struktur pemerintahannya, serta menolak pengaruh asing, terutama. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 152 Konstitusi Iran yang menolak dominasi asing dan menjunjung solidaritas Islam. Pandangan ideologis Iran, yang menilai sistem religius lebih unggul dari demokrasi liberal, memperkuat ketegangan dengan AS.

Bagi AS, Iran bukan sekadar lawan geopolitik, tetapi simbol perlawanan terhadap tatanan internasional berbasis nilai-nilai liberal. Karena itu, kebijakan CAATSA tidak hanya dirancang untuk membatasi program nuklir dan aktivitas militer Iran, tetapi juga sebagai upaya melemahkan legitimasi rezim yang dianggap ekstrem, represif, dan tidak kompatibel dengan sistem global liberal.

## **B. Faktor Domestik**

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri, dinamika domestik tak kalah penting dibanding faktor internasional. Dalam kebijakan CAATSA terhadap Iran, empat indikator domestik yang memengaruhi keputusan AS meliputi: kepentingan ekonomi, opini publik, siklus pemilu, dan permainan dua tingkat. Keempat indikator ini menunjukkan bagaimana tekanan domestik turut membentuk arah kebijakan strategis AS.

### **Kepentingan Ekonomi**

Kepentingan ekonomi dalam kebijakan luar negeri berarti negara mengutamakan perlindungan dan akses terhadap sumber daya serta keuntungan ekonomi dalam mengambil keputusan. Penerapan kebijakan CAATSA terhadap Iran menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS tidak semata didorong oleh isu keamanan, tetapi juga kepentingan ekonomi dan persaingan global. Revolusi energi domestik membuat AS lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada minyak Timur Tengah (Express, 2019). Akibatnya, menjatuhkan sanksi terhadap Iran tak lagi mengancam kepentingan energi AS. Sebaliknya, kebijakan ini justru memberi keuntungan strategis, karena perusahaan-perusahaan energi Amerika bisa mengisi kekosongan pasokan minyak yang sebelumnya dipenuhi oleh Iran, khususnya di kawasan Asia. Dalam hal ini, kebijakan

CAATSA dapat dilihat sebagai alat untuk memperluas pengaruh pasar energi AS dan membatasi peran negara-negara pesaing seperti Iran di panggung energi global.

Namun lebih jauh, kebijakan CAATSA bukan hanya soal menekan Iran atas isu nuklir atau kebijakan regionalnya, tapi juga merupakan bagian dari strategi ekonomi AS untuk menghambat laju pertumbuhan negara-negara seperti China. Banyak negara Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan masih sangat bergantung pada minyak dari kawasan Teluk, termasuk Iran (Express, 2019). Dengan sanksi sekunder yang diberlakukan, AS menekan negara-negara ini agar menghentikan pembelian minyak Iran, yang pada akhirnya dapat memicu instabilitas ekonomi dan ancaman terhadap ketahanan energi mereka. Dominasi dolar AS memperkuat daya tekan sanksi ini, mendorong negara dan perusahaan asing menjauhi Iran untuk menghindari risiko kehilangan akses ke pasar dan sistem keuangan global. Meski perdagangan langsung AS-Iran terbatas, efek sanksi tetap besar karena mengisolasi Iran secara ekonomi.

Kebijakan CAATSA, dalam hal ini, menjadi senjata ekonomi sekaligus politik, menekan lawan regional seperti Iran dan pada saat yang sama menghambat pertumbuhan ekonomi negara lainnya agar tetap berada di bawah pengaruh ekonomi dan politik AS. Narasi-narasi moral seperti isu HAM dan senjata nuklir seringkali digunakan hanya sebagai pembenaran, sementara motif utamanya tetap pada dominasi ekonomi global yang ingin dipertahankan AS.

### **Opini Publik**

Opini publik adalah sikap dan dukungan masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan pemerintah dalam menggunakan kekuatan atau mencari perdamaian dalam kebijakan luar negeri. Survei Gallup pada 2017–2020 menunjukkan bahwa mayoritas warga AS memandang Iran secara negatif, dengan tingkat penolakan publik mencapai 79–88% dan dukungan hanya 11–17% (Mccarthy, 2020). Dalam sistem demokrasi seperti di AS, opini publik memiliki pengaruh signifikan terhadap arah

kebijakan luar negeri. Sentimen negatif yang begitu kuat terhadap Iran memberikan legitimasi politik bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah koersif, seperti pembentukan sanksi melalui kebijakan CAATSA. Tren penolakan yang konsisten dari tahun ke tahun memperkuat narasi bahwa Iran dianggap sebagai ancaman oleh publik, sehingga para pengambil kebijakan merasa memiliki dukungan domestik yang cukup untuk bertindak tegas. Dengan kata lain, opini publik yang negatif ini tidak hanya mencerminkan sikap masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bersifat konfrontatif terhadap Iran.

Survei Chicago Council juga mencatat bahwa 79% responden mendukung sanksi ekonomi ketat jika Iran melanjutkan program nuklirnya, dengan dukungan tinggi dari Partai Republik (87%), Demokrat (80%), dan independen (73%) (Sullivan, 2022). Tingginya dukungan terhadap sanksi ini mencerminkan preferensi publik Amerika untuk menekan Iran melalui jalur sanksi ketimbang melalui tindakan militer langsung, yang dianggap lebih berisiko. Kebijakan sanksi dipandang sebagai cara strategis untuk membatasi ambisi Iran tanpa harus mengorbankan personel militer atau memicu konflik bersenjata terbuka.

### **Siklus Pemilu**

Siklus pemilu memengaruhi perilaku dan keputusan para pemimpin politik, karena mereka cenderung mengambil kebijakan yang populis atau menguntungkan secara politik menjelang pemilu demi mendapatkan dukungan publik. Selama kampanye pemilu 2016, Donald Trump secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap kesepakatan nuklir Iran (JCPOA), yang ia sebut sebagai "bencana", dan berjanji akan membatalkannya jika terpilih. Dalam pidatonya di Konferensi AIPAC, ia menekankan komitmen terhadap Israel dan menguraikan tiga langkah keras terhadap Iran: melawan agresi regional, membongkar jaringan teror, dan menegakkan sanksi lebih tegas (JTA, 2016). Sikap tersebut bukan semata-mata cerminan perhitungan kebijakan luar negeri, tetapi juga bagian dari strategi untuk menggalang dukungan politik, terutama dari

kelompok konservatif dan lobi pro-Israel yang sejak lama melihat Iran sebagai ancaman serius

Isu Iran menjadi perdebatan utama dalam pemilu 2016. Sementara kandidat lain mendukung JCPOA sebagai solusi diplomatik untuk mencegah proliferasi senjata nuklir di Timur Tengah. Sebaliknya, Donald Trump secara terbuka menentangnya, menyebutnya sebagai kesepakatan buruk yang merugikan AS, dan berjanji akan membatalkannya jika terpilih. Trump berpendapat bahwa kesepakatan itu justru memperkuat posisi Iran di dunia, sebuah pandangan yang juga ditegaskan oleh penasihat kebijakan luar negerinya, Michael Flynn, yang menilai perjanjian tersebut gagal menghentikan ambisi nuklir Iran dan malah mendanai terorisme (Ballotpedia, 2016).

Melihat kembali kampanye pemilu 2016, dapat dipahami bahwa kebijakan CAATSA terhadap Iran bukan hanya didasarkan pada alasan keamanan atau kepentingan strategis AS, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang berkaitan erat dengan siklus pemilu. Donald Trump memanfaatkan isu Iran sebagai bagian dari strategi kampanyenya untuk tampil sebagai pemimpin yang tegas dan pro-Israel, sekaligus menarik dukungan dari pemilih konservatif. Penolakannya terhadap kesepakatan nuklir JCPOA serta janjinya untuk bersikap keras terhadap Iran menjadi cara untuk membedakan diri dari pemerintahan sebelumnya dan menunjukkan komitmennya kepada sekutu seperti Israel. Janji tersebut kemudian diwujudkan melalui kebijakan nyata, salah satunya adalah dengan pengesahan kebijakan CAATSA pada Agustus 2017 yang mendapat dukungan lintas partai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan CAATSA tidak hanya merupakan respons terhadap ancaman Iran, tetapi juga sebagai kelanjutan dari agenda politik yang telah dibangun sejak masa kampanye.

### **Permainan Dua Tingkat**

Permainan dua tingkat menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan CAATSA terhadap Iran, dibentuk melalui interaksi antara dua arena: internasional (Level I) dan domestik (Level II) (Putnam, 1996). Di Level I, AS menggunakan kebijakan CAATSA sebagai instrumen

koersif untuk menekan Iran terkait program nuklir dan dukungan terhadap kelompok bersenjata, serta memperingatkan negara lain agar tidak menjalin kerja sama strategis dengan Iran. Sementara itu, Level II menyoroti pentingnya dukungan domestik dalam pengambilan keputusan. Kebijakan CAATSA mendapat legitimasi dari Kongres bipartisan, kelompok lobi, sektor industri, serta opini publik yang memandang Iran sebagai ancaman. *Win-set* domestik yang luas memungkinkan Presiden Trump menerapkan sanksi dengan tegas, sekaligus memperkuat citra kepemimpinannya.

Selain itu, hubungan AS dengan sekutu seperti Israel dan Arab Saudi turut memperkuat legitimasi domestik kebijakan ini. Dukungan eksternal tersebut membantu meyakinkan publik dan parlemen bahwa sanksi terhadap Iran selaras dengan kepentingan strategis AS. Dengan demikian, kebijakan CAATSA mencerminkan bagaimana tekanan domestik dan kepentingan internasional saling memperkuat dalam proses pengambilan keputusan luar negeri AS. Keberhasilan kebijakan CAATSA pun tidak hanya bergantung pada seberapa besar tekanan yang berhasil diberikan kepada Iran, tetapi juga pada kemampuannya membangun dukungan domestik dan menjaga citra Amerika sebagai pemimpin global.

### **3. KESIMPULAN**

Pembentukan kebijakan CAATSA terhadap Iran mencerminkan perpaduan antara faktor internasional dan faktor domestik dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari perspektif faktor internasional, sanksi ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman militer dan ambisi nuklir Iran, sekaligus upaya menghindari eskalasi perlombaan senjata di Timur Tengah. Kebijakan CAATSA juga mempertegas komitmen aliansi strategis AS dengan negara-negara sekutu seperti Israel dan Arab Saudi yang sama-sama memandang Iran sebagai ancaman regional. Tak kalah penting, tipe rezim otoriter dan teokratis Iran yang bertentangan dengan nilai-nilai liberal demokrasi turut memperkuat citra AS sebagai pelindung tatanan internasional berbasis nilai.

Sementara itu, di ranah faktor domestik, kebijakan ini didorong oleh kepentingan ekonomi, terutama untuk menjaga dominasi pasar energi global dari pengaruh Iran. Opini publik dalam negeri yang cenderung negatif terhadap Iran turut memberi legitimasi bagi pendekatan koersif. Di sisi politik, siklus pemilu pasca terpilihnya Donald Trump dengan retorika keras terhadap Iran memperkuat arah kebijakan tersebut. Jika dilihat dari kaca mata permainan dua tingkat, kebijakan CAATSA mencerminkan sinergi antara kepentingan internasional (Level I) dan konsolidasi dukungan domestik (Level II), yang secara bersama-sama memungkinkan tercapainya kebijakan luar negeri yang tegas dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alex Mintz, K. D. J. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. In *Sustainability*. New York: Cambridge University Press.
- Alkhold, A. M. (2021). Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(1).
- Angelia, T. (2021). Konflik Amerika Serikat dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 1(2), 103–110.
- Azizah, R. Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3), 94–104.
- Ballotpedia. (2016). *2016 presidential candidates on the Iran nuclear deal*. Ballotpedia.  
[https://ballotpedia.org/2016\\_presidential\\_candidates\\_on\\_the\\_Iran\\_nuclear\\_deal](https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_the_Iran_nuclear_deal)
- Congress, U. S. (2017). *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*. Congress.Gov. <https://congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf>
- El-Komy, F. (2025). *Sanctions and Self-Sufficiency: The Evolution of Iran's Manufacturing Sector*. Al Habtoor Research Centre.  
<https://www.habtoorresearch.com/programmes/sanctions-iran->

manufacturing/?

- Express, I. (2019). *Bigger Picture of USA's Action Against Iran*. Drishti. <https://www.drishtiiias.com/pdf/1588001644-bigger-picture-of-usas-action-against-iran.pdf>
- Georgi, K. C. (-2017). *Evaluating the Iran Section of CAATSA: More Secondary Sanctions Codified, More Congressional Oversight, But Not Much Real Change*. ArentFox Schiff. <https://www.afslaw.com/perspectives/alerts/evaluating-the-iran-section-caatsa-more-secondary-sanctions-codified-more>
- Hasibuan, W. A. (2020). Konfrontasi Iran-Amerika Serikat di Selat Hormuz dan Dampaknya bagi Distribusi Penjualan Minyak Dunia. *Jurnal ICMES*, 4(2), 212–230.
- JTA. (2016). *Full text of Donald Trump's speech to AIPAC*. The Times of Israel. <https://www.timesofisrael.com/donald-trumps-full-speech-to-aipac/>
- Malik, M. M. bin. (2022). Pemikiran Politik Liberal dalam Dasar Luar Amerika Serikat dan Impaknya Kepada Negara-Negara Islam. *Pemikiran Islam*, 5(2).
- Mccarthy, J. (2020). *Iran, North Korea Liked Least by Americans*. GALLUP. <https://news.gallup.com/poll/287153/iran-north-korea-liked-least-americans.aspx>
- Mohamad Fuat Najib, M. F. N. (2022). Nuklir Iran dalam Neorealisme Defensif. *Journal of Integrative International Relations*, 7(1), 76–94.
- Muhammad, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Purba, J. I. S., Harifin, H., Simamora, S., Nazwa, M. D., Br Perangin-angin, D. R., & Br Sembiring, S. H. (2024). Analisis Sejarah Penyebab Awal Konflik antara Amerika Serikat dan Iran. *Polyscopia*, 1(3), 152–156.
- Putnam, R. D. (1996). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3).
- Putri, G. I., Sidik, H., & Simbolon, K. (2023). *Tujuan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perjanjian Abraham Tahun 2020*. 5(2), 50–85.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Stewart, I. (2022). *CAATSA: The Most Important Sanctions Authority You Have*

*Never Heard Of. CNS Research and Guidance.*  
<https://sites.middlebury.edu/tradecompliance/2022/03/15/caatsa-the-most-important-sanctions>

Sullivan, D. S. dan E. (2022). *Americans Support Sanctions on Iran*. Global Affairs. <https://globalaffairs.org/research/public-opinion-survey/2022/americans-support-us-return-iran-nuclear-deal>

Wambrauw, M. S. F., & Apintamon, M. (2021). Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 56–72.

Yuanita, A. Z., Ribawati, E., Noeriman, T., & Sumantri, A. (2024). Kondisi Amerika Setelah Perang Dingin Berakhir. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 171–179.

Yusra, M., & Dermawan, R. (2020). Pertimbangan Amerika Serikat Menjatuhkan Sanksi Countering America' s Adversaries Through Sanction Act ( CAATSA ) ke Turki Tahun 2020. *PALITO*.